

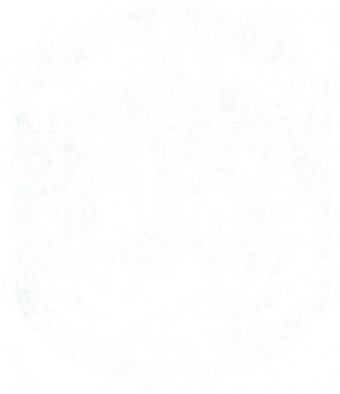


RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2024



ALAN 1 2430

1971

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat Rahmat, Taufik dan Hidayat-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga penyusunannya telah berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJP, RPMJD, Renstra PD dan RKPD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen Renja ini agar dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan dan sumbangsihnya sehingga Renja ini dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.....	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur	35
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V PENUTUP	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut Satpol PP, sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Renja Satpol PP Tahun 2024.

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satpol PP ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.



21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Satpol PP Kab Luwu Timur Tahun 2024 adalah:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun;
3. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun;
4. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. IV PENUTUP

- 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 4.2. Kaidah Pelaksanaan

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan serta sejauhmana realisasi pencapaian target kinerja program/kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

Dalam rangka pencapaian sasaran serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 telah melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah
01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA_SKPD
03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
05	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah
01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

05	Koordinasi dan Penyusunan akuntansi SKPD
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
04	Penyediaan bahan logistic kantor
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
08	Fasilitasi kunjungan tamu
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
09	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
2.08	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

01	Penyediaan Jasa Surat menyurat
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
11	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah
01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
02	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
01	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini ,pembinaan dan penyuluhan,Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan
02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
03	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/Kota
04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
08	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum
09	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

10	Penyediaan Layanan dalam dalam rangka dampak penegakan peraturan Daerah dan Perkada
2.02	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota
01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/Kota
01	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS

Untuk melihat hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 berikut disajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada Tabel. T-C.29



Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan
Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2023
Kabupaten Luwu Timur

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)		Pekiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang urusan Perangkat Daerah Yang sesuai Standar	100 %		100%			100%			
	Perencanaan, Penganggaran,Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%		100%			100%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang di susun	2		2			2			
	Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1		1			2			
	Kordinasi Dan penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1		1						
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yag disusun	1		1			2			
	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1		1						



Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	3	3	3					
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Yang di susun tepat waktu	8	8	8			11		
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%			100%		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan(Orang)	47	47	47			39		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100	100	100			4		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	100%	100%					
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan akuntansi SKPD	100%	100%	4					
	Pengelolaan dan Penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan	Persentase pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan dan pemeriksaan pemeriksaan	100%	100%	100%					
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan blanai/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12	12	12			12		

RENCANA KERJA TAHUN 2024



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosirealisasi anggaran Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	1		1					
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD perangkat Daerah yang diadministrasi sesuai standar Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	100%		100%			100%		
	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	1		1					
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan BMD pada SKPD	12		12			12		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	100%		100%			100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	275					-		
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4		4			4		
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	5		5			4		
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	23		23					



Kode	Ususi/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	47		47			39		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10		10			12		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum	100%		100%			100%		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	177		177			166		
	Penyediaan peralatan rumah Tangga	Jumlah paket pralatan rumah tangga yang disediakan	210		210			191		
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	11		11			10		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10		10			10		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72		72			72		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	180		180			12		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	275		275			422		

RENCANA KERJA TAHUN 2024



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan daerah	Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	77.5	5	77.5%			100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	2		2					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	40		40			16		
	Pengadaan Aset Tak berwujud	Jumlah unit asset tak berwujud yang diadakan	1		1					
	Pengadaan gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung/kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5		5					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1		1					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	1		1			1		
	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%			100%		



Kode	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2500		2500			12		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36		36			60		
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1		1			2		
	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	100%		100%			100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1		1			1		
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30		30			36		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pralatan dan mesin yang dipelihara	100		100			93		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2		2			2		

RENCANA KERJA TAHUN 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	7		7			7		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%		100%			100%		
		Persentase gangguan transtibum yang diselesaikan	100%		100%			100%		
		Persentase penegakan perda	100%		100%			100%		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah kabupaten/kota	Persentase tertib penyelenggaraan transtibum yang ditangani	100%		100%			100%		
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus gangguan ketenteramana dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	-		-			365		
		Jumlah Patroli siaga ketenterman dan ketertiban umum yang ditangani	4015		4015					



Kode	Ususi/Bidang Ususi Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Operasi deteksi dini dan cegah dini yang dilaksanakan(kali)	264		264					
		Jumlah Operasi Pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	1144		1144					
		Jumlah pengamanan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan	1144		1144					
		Jumlah Pengamanan Pejabat dan aset daerah yang dilaksanakan	365		365					
		Jumlah Pengawasan Pejabat dan Tamu daerah (VIP/VIP) yang dilaksanakan	120		120					
		Jumlah Tenaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat yang upahnya dibayarkan	216		216					
	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah operasi Penerbitan pelanggaran/gangguan K3 yang dilaksanakan	450					458		
		Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilaksanakan	8		8					

RENCANA KERJA TAHUN 2024



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	48		48			15		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pembedayaan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	12					26		
		Jumlah Peilbatan (mobilisasi) Satlinmas dalam kegiatan penanggulangan bencana	128		128					
		Jumlah anggota satlinmas yang mengikuti pelatihan	2		2					
		Jumlah kegiatan pemberdayaan Satlinmas yang dilaksanakan	1280		1280					
		Jumlah anggota Satlinmas yang dikukuhkan	4		4					
		Jumlah monitoring dan evaluasi Satlinmas yang dilaksanakan								
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya						230		



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	tugas yang bermuansa hak asasi Manusia									
		Jumlah aparatatur Satpol PP yang mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas SDM	216		216					
		Jumlah Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP yang dilaksanakan	6		6					
		Jumlah Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang mengikuti pelatihan	185		185					
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan yang dilaksanakan	1		1					
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat Kompetensi	6		4					
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketriban umum	Jumlah kerjasama penyelenggaraan trantibum dan penegakan perda yang dilaksanakan	2		2			2		
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Keterliban Masyarakat	Jumlah perlengkapan operasional yang diadakan	50		50					



Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	136		136			58		
		Jumlah gedung posko tranitubum yang di adakan	2		2					
		Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	5		5					
	Penyusunan SOP ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang disusun/diditandatangani	20		20			20		
	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan Daerah dan perkada	Jumlah layanan ganti rugi kerusakana barang asset akibat terkena dampak penegakan perda dan perkada	5		5			4		
		Jumlah layanan pengobatan cidera akibat terkena dampak penegakan perda dan perkada	5		5					
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Perauran Bupati/Walikota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100%		100%			100%		
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan Bupati yang dilaksanakan	46		46			26		



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh sosialisasi perda/perkada	2350		2350					
		Jumlah sosialisasi pengendalian peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan	23		23					
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang dilaksanakan	60		50			26		
		Jumlah Pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan	22		22					
		Jumlah pengawasan kawasan tanpa rokok (KTR) yang dilaksanakan	44		44					
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran perda dan perkara yang tertangani	45		45			56		
		Jumlah Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Yang tertangani	13		13					
	Pembinaan Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang berkompeten	87.5%		100%			75%		



Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Satpol PP Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Satpol PP Tahun 2023	Realisasi Renja Satpol PP Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengembangan Kapasitas dan Kader PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas PPNS dalam mendukung penyelenggaraan transtibum serta penegakan perda dan perkara						2		
		Jumlah PPNS yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas	3		3					
		Jumlah Rakor PPNS yang dilaksanakan	4		4					
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang mengikuti diklat PPNS	1		1					



Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam hal penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Luwu Timur. Satpol PP Kabupaten Luwu Timur menerapkan standar dan tolok ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan beberapa peraturan pelaksanaannya, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya sebagaimana dapat dilihat di dalam pada Tabel T-C.30.



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Persentase penanganan perkara			90%	86%	86%	100%	85,91%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase gangguan transibum yang dapat diselesaikan			68%	71%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase warga Negara yang menerima layanan akibat dampak penegakan perd/perkada					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)			13	15	15	11	7,16	7,34	12	13	13	
5	Persentase Satlinmas Desa/Kelurahan yang aktif					4,72	8,59	4,72	8,59%	25,78%	49,97%	49,97%	
6	Persentase SDM aparaturne terlatih					33,7	49,61	33,7	49,34	62,52	78,82	78,82	
7	Persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai standar						23,99		23,99	40,46			
8	Persentase Standar Operasional Prosedur Transibum yang dipenuhi					10	20	10	10	20	20	20	
9	Persentase perd dan perkada yang ditegakkan						100%		100%	100%	100%	100%	

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri atas penanganan gangguan ketenteraman ketertiban dan keindahan, penyelesaian penegakan peraturan daerah, keterlibatan satlinmas dalam penanggulangan bencana. Adapun selengkapny dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	7,69%	9,10	10	11,11	12	14,28	14,28
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan TRantibum	7,69%	9,10	10	11,11	12	14,28	14,28
3	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan Dasara SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65%	66,99	68	70	71,75	73,75	73,75
4	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100

Sedangkan untuk Indikator Kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	8,37	11,00	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	1005	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penegakan PERDA	86%	100%	100%	100%	100%	100%	94,00%

Untuk target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

No	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP adalah

- 1) Keterbatasan kompetensi pegawai yang ada (PNS dan Upah Jasa),
- 2) Terbatasnya sarana prasarana
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dan ketaatan terhadap peraturan daerah.
- 4) Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem koordinasi yang baik antar stakeholder penegakan peraturan daerah yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Luwu Timur yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non-yustisial dan pro-yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

Berkaca pada permasalahan yang ada, direkomendasikan bahwa:

- 1) Guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, penyelenggaraan ketertiban, dan penegakan peraturan daerah maka akan diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu menangani gangguan Ketertiban, ketenteraman dan keindahan, menyelesaikan pelanggaran perda/perkada
- 3) Dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak diantaranya Polri/TNI, OPD Pengampu

Peraturan Daerah, para aparat di tingkat kecamatan desa/kelurahan hingga RT dan Dusun.

- 4) Penambahan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja .

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD.

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Satpol PP . Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31

ib. Luwu Tim
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Ususan / Bidang Ususan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target
			Satuan Polisi Pamong Praja											
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1	05	02	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
1	05	02	Pencengahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan											
			-	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dideteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	365 Kasus	-	5.464.344.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum yang Dideteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 Kasus	10.091.362.980,00	
1	05	02	2.01	02	Penindakan Alias Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
			-	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	458 Kasus	-	78.409.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	458 Kasus	147.750.000,00	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									

[illegible]

Rencana Tahun 2024															Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Kode	Usuan / Bidang Usuan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur				Target			
		-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Keputusan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	58 Laporan	-	118.727.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Keputusan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	58 Laporan		208.967.000,00		
1			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	5 Laporan	-	170.030.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Dilangani Sesuai SOP	5 Laporan		250.000.000,00		
1		05	02	2.02	03					101.152.500,00						200.000.000,00	
1						-		-		101.152.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keleniteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan		200.000.000,00	
1		05	01					-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Keleniteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			7.435.629.202,00	
1		05	01	2.01						5.422.684.420,00						99.995.258,00	
1		05	01	2.01	01												

Kode				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target
					-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
					-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
					-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Dokumen	-		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	11 Laporan	-		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
					-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	11 Laporan	-		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5.870.305.140,00
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	39 Orang/bulan	-		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan
					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	39 Orang/bulan	-		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	4 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	4 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	4 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen
					-	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	4 Dokumen	-		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen

Rencana Tahun 2024															Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Kode		Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja							Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
				-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-	16.333.200,00	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	40.000.000,00		
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												15.198.968,00
					-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	-	22.685.400,00	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan			
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												25.954.500,00
1	05	01	2.03	06	Penelausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
					-	Jumlah Laporan Pendausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	-	23.228.700,00	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pendausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	25.954.500,00		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												231.565.680,00
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
					-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	-	7.596.800,00	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	10.650.000,00		
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												21.296.000,00
					-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	-	20.720.000,00	PENDAPATAN NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen			
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												

Rencana Tahun 2024																	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Tolok Ukur	Target				
1	05	01	2.05	11	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	39 Orang	-	3.943.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Pe rundang-Und angan	39 Orang	7.986.000,00			
1	05	01	2.05	11	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	12 Orang	-	179.320.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Pe rundang-Und angan	12 Orang	191.633.680,00			
1	05	01	2.06		-							446.457.150,00				403.222.526,00			
1	05	01	2.06	01	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
1	05	01	2.06	03	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	166 Paket	-	7.215.600,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Liatr ik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	166 Paket	9.982.500,00			
1	05	01	2.06	03	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	191 Paket	-	10.178.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	191 Paket	16.105.000,00			
1	05	01	2.06	04	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	10 Paket	-	6.012.500,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket: Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.986.000,00			
1	05	01	2.06	05	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	10 Paket	-	11.430.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	16.105.100,00			
1	05	01	2.06	06	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	72 Dokumen	-	7.800.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	10.648.000,00		
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					-	12 Laporan	-	8.100.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000,00	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					-	422 Laporan	-	395.721.050,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422 Laporan	330.395.926,00	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	16 Unit	-	152.100.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	197.653.500,00	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	1 Unit	-	107.000.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	173.030.000,00	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	12 Laporan	-	6.174.800,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.655.000,00	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					-	12 Laporan	-	108.657.800,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	133.129.873,00	

Kode				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Praktiran Maju Rencana Tahun 2025		
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.08	04	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	60 Laporan	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	96.474.873,00
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	30.000.000,00
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	30.000.000,00
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	2 Laporan	-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	30.000.000,00
1	05	01	2.09											300.772.725,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
1	05	01	2.09	01	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	1 Unit	-		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.098.100,00
1	05	01	2.09	02	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	36 Unit	-		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	159.187.600,00
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	36 Unit	-		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	159.187.600,00
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	36 Unit	-		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	159.187.600,00
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	36 Unit	-		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	159.187.600,00
1	05	01	2.09	06	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	93 Unit	-		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	79.860.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
1	05	01	2.09	09	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	93 Unit	-		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	93 Unit	79.860.000,00

Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
			-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 Unit	-	-	16.875.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	22.480.625,00			
1	05	01	2.09	10	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	7 Unit	14.400.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	19.166.400,00		
TOTAL										12.504.299.900,00			20.993.055.162,00		

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengusung tema “Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”.

Pada RKP 2024 memuat tujuh prioritas nasional yang salah satunya berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Prioritas ke tujuh “Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, Satpol PP menetapkan tujuan:

“Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif”

Adapun Sasaran Satpol PP Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal
- 2) Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah.

Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyangkut kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen perencanaan
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semester

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
- sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.5 Administrasi Umum perangkat Daerah

- penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

- penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Keempatannya sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Keempatannya sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatannya sebagai berikut :
- 1.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.. Sub kegiatannya sebagai Berikut :
- Pencegahan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan

- Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
 - Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia.
 - Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum
 - Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
 - Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- 2.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, Sub Kegiatannya sebagai berikut :
- Sosialisasi Penegakan daerah dan Peraturan Bupati/walikota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota
- 2.3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupten/Kota, Sub kegiatannya sebagai berikut ;
- Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 secara detail dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut ini:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.944.299.900,00							20.983.055.162,00	
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERAMPILAN DALAM KESEHATAN DAN KERTIBATAN LUMING SERTA PERLUNGAN MASYARAKAT						11.944.299.900,00							20.983.055.162,00	
1. 1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-		-	-	5.422.694.420,00						-	7.435.629.202,00	
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	86.052.000,00						2 Dokumen	99.995.255,00	
1.05.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	29.666.200,00	- Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Pengantar Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	37.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	5.479.000,00	- Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	6.649.150,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	7.591.000,00	- Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Dokumen	8.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN KAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	22.885.400,00	- Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	15.198.988,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	23.228.700,00						12 Laporan	25.954.500,00	
	1.05.01.2.03.06	Penalusaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Pendausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	23.228.700,00	- Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	12 Laporan	25.954.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	211.579.800,00						4 Dokumen	231.565.680,00	
	1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	7.596.800,00	- Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	10.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	20.720.000,00	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	4 Dokumen	21.286.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	39 Orang	3.843.000,00	- Kab. Luwu Timur, Malli, Malli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	39 Orang	7.886.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Kelembagaan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan		Laporan	2 Laporan	101.152.500,00	- Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Penguatan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Inovatif	-	2 Laporan	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			J U M L A H						11.944.299.900,00							20.993.055.162,00

BAB V

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan sebagai implementasi dari Renstra SKPD Satpol PP Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2024 dilakukan dengan berupaya mewujudkan konsistensi antara dokumen renja SKPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satpol PP .

Renja Satpol PP merupakan dokumen operasional yang memuat sejumlah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024 melalui koordinasi/asistensi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai proses dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. RKA yang telah disetujui oleh TAPD dan DPRD dalam pembahasan RAPBD akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP sebagai penjabaran dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Renja Satpol PP Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja Perangkat Daerah, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Bagi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, Dokumen Renja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun



Handwritten text or stamp in the top right corner.

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through. The text appears to be organized into several paragraphs or sections, separated by faint horizontal lines. Some words are more legible than others, but the overall content is difficult to discern.

kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satpol PP Tahun 2024, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program.

3. Pada Akhir Tahun anggaran 2024, Satpol PP wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.

Akhir kata semoga Renja Satpol PP Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Makassar, Juni 2023
Kepala Satpol PP



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002